



**PENAGIHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO. 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN  
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN DENDA ADMI-  
NISTRASI UNDANG- UNDANG NO.6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN  
TATA CARA PERPAJAKAN**

**TESIS**

**NUROZI**

**1710622007**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2019**



**PENAGIHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO. 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN  
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN DENDA ADMI-  
NISTRASI UNDANG- UNDANG NO.6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN  
TATA CARA PERPAJAKAN**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**NUROZI**

**1710622007**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2019**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar,

Nama : N u r o z i  
NRP : 1710622007  
Tanggal : 11 Juli 2019

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 11 Juli 2019

Yang menyatakan,



N u r o z i

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : N u r o z i  
NRP : 1710622007  
Tanggal : 11 Juli 2019

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENAGIHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 19  
TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA  
DAN DENDA ADMINISTRASI UNDANG - UNDANG NO.6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : di Jakarta  
Pada Tanggal : 11 Juli 2019  
Yang Menyatakan,



**N u r o z i**

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :  
Nama : N u r o z i  
NRP : 1710622007  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : Penagihan Pajak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Denda Administrasi Undang- Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

  
Dr. Suberman, SH. LLM

Ketua Penguji

  
Dr. Arrisman, SH., M.H

Penguji / Pembimbing I

  
Dr. Imam Haryanto, SH. M.H

Sekretaris / Pembimbing II

  
Dwi Desi Yafi Tarina, SH., M.H

Dekan

  
Dr. Handovo Prasetyo SH.MH

Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 11 Juli 2019





**PENAGIHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO. 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN  
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN DENDA ADMI-  
NISTRASI UNDANG- UNDANG NO.6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN  
TATA CARA PERPAJAKAN**

**N u r o z i**

Program Pasca Sarjana Magister Hukum UPN “Veteran” Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan – 12450

Telp. 021-7656971

**Abstrak**

Pajak adalah Perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang untuk membayar sejumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan pajak agar wajib pajak /penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan pemblokiran rekening, melaksanakan penyanderaan, menjual barang telah disita. Penagihan pajak mempunyai kedudukan yang penting sekali karena menyangkut masalah pencairan piutang Negara dan penegakan hukum bagi wajib pajak yang mempunyai hutang pajak mulai sanksi denda administrasi dengan pembayaran bunga penagihan sampai dengan sanksi pidana berupa penyanderaan (gezeling). Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang setiap tahunnya selalu meningkat dan dijadikan sebagai pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan Indonesia bisa mandiri tanpa menutup kekurangan pembiayaan Negara dengan hutang.

Kata kunci : Penagihan Pajak, Sumber Pembiayaan Negara

**PENAGIHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO. 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN  
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN DENDA ADMI-  
NISTRASI UNDANG- UNDANG NO.6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN  
TATA CARA PERPAJAKAN**

**N u r o z i**

Program Pasca Sarjana Magister Hukum UPN “Veteran” Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan – 12450  
Telp. 021-7656971

***Abstract***

*Tax is engagements that arises because of the act of which requires someone who qualified specified in the act of pay a certain amount of against the country that can forced with are not able to obtain of those who directly may be appointed , that are used to fund expenses the state. Billing tax was a series of the act of tax that taxpayers / the person in tax pay off the debt taxes and its cost billing tax by reminding or warns, billing instantly and and tell a letter force, proposed prevention, implement seizure, implement the accounts, implement a standoff, sell goods have seized. Billing tax has a place important all because related to the issues disbursement receivable the state and law enforcement for taxpayers who have debt tax start the fine administration with interest payments billing up to criminal sanctions of penyand. Sources of income tax is a country that is necessary to meet state budget ( budget ) which annually is increasing expected collected from the tax fore indonesia could be independent in the interests of membiyayai without loan.*

*Key word: Billing Tax, The State Income*

## KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan rasa syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas hidayah dan ridho-Nya penulis diberikan semangat, kesabaran, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini. Tak lupa shalawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirator bagi kita semua dan senantiasa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Penulisan tesis ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang berjudul “Penagihan Pajak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Denda Administrasi Undang- Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”.

Dalam penulisan tesis ini, tidak terlepas dari semua pihak yang telah membantu sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, ijinkanlah Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, sebagai Rektor UPN “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta;
3. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH, selaku Kepala Jurusan Studi Magister Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jakarta;
4. Bapak Dr. Arrisman, SH. MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
5. Bapak Dr. Imam Haryanto, SH. MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan teknis dengan sabar;
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh jajaran staff Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UPN “Veteran” Jakarta;
7. Keluarga, Anak-anak dan istri tercinta Dra. Titik Sugihartilawati Dewi, MP.d yang telah memberikan dukungannya selama ini dan membantunya dalam penyelesaian tesis ini;



8. Rekan-rekan Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UPN “Veteran” Jakarta angkatan 2017 yang senantiasa memberikan support dan bantuannya.

Tesis ini berusaha menggambarkan aspek-aspek hukum tentang Penagihan Pajak dilihat dari sisi keadilan dan kewajaran dan seberapa jauh surat paksa itu mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan Pengadilan Negeri.

Tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan. Akhirnya semoga Allah SWT membalas amal semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Jakarta, 11 Juli 2019

Nurozi

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	6
I.3 Tujuan Penelitian .....	6
I.4 Manfaat Penelitian .....	6
I.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
I.4.2 Manfaat Praktis .....	7
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	7
I.5.1 Kerangka Teori .....	7
I.5.2 Kerangka Konsep .....	11
I.6 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENAGIHAN PAJAK DAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK .....	15
II.1 Sejarah Perkembangan Pajak .....	15
II.1.1 Masa Penjajahan Belanda .....	16
II.1.2 Masa Penjajahan Jepang .....	17
II.1.3 Masa Kemerdekaan Republik Indonesia .....	18
II.2 Urgensi Pajak, Eksistensi dan Fungsi Hukum Pajak .....	21
II.3 Pajak dan Hak Penerimaan Negara .....	22
II.3.1 Sumber-sumber Pendapatan/Penerimaan Negara .....	22
II.4 Urgensi Pajak Bagi Negara .....	25
II.5 Pajak Dalam APBN .....	26
II.6 Rasio Penerimaan Pajak .....	31
II.7 Pajak dan Kemandirian Ekonomi Bangsa .....	34
II.8 Fungsi Pajak .....	35
II.8.1 Fungsi Budgeter .....	36
II.8.2 Fungsi Regulator .....	34
II.8.3 Fungsi Lainnya .....	39
II.8.4 Fungsi Keseimbangan .....	40

II.8.5	Fungsi Pertumbuhan Ekonomi .....	40
II.9	Kepastian Hukum dan Keadilan.....	41
II.10	Jenis- jenis Penagihan Pajak .....	44
II.10.1	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .....	44
II.10.2	Penagihan Pajak Dengan Perintah Melaksanakan Penyitaan.....	46
II.10.3	Penagihan Pajak Dengan Blokir Rekening Wajib Pajak.....	55
II.10.4	Penagihan Pajak Dengan Pencegahan.....	58
II.10.5	Penagihan Pajak Dengan Penyanderaan .....	59
II.11	Surat Ketetapan Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak .....	61
II.11.1	Surat Ketetapan Pajak .....	61
II.11.2	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) .....	64
II.11.3	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).....	66
II.11.4	Surat Ketetapan Lebih Bayar .....	68
II.11.5	Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) .....	68
II.11.6	Surat Tagihan Pajak (STP).....	68
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
III.1	Tipe Penelitian.....	69
III.2	Sifat Penelitian.....	70
III.3	Sumber Data.....	71
III.4	Tehnik Analisis Data.....	72
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS YURIDIS PENAGIHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 1997 DAN UNDANG- UNDANG NO. 6 TAHUN 1983 .....</b>	<b>73</b>
IV.1	Analisis Yuridis Penagihan Pajak Dalam Persepektif Undang – Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat paksa .....	73
IV.2	Analisis Yuridis Penagihan Pajak Dalam Persepektif Undang – Undang No. 6 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
V.1	Kesimpulan .....	85
V.2	Saran .....	85
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
	<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tax Rasio .....	32
Tabel 2	Penerimaan Pajak .....	32
Tabel 3	Penandatanganan BAPS Wajib Pajak Penanggung Pajak Badan .....	51
Tabel 4	Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak .....	75
Tabel 5	Kontribusi Pencairan Dari Tindakan Penagihan .....	76
Tabel 6	Pencairan Rata-rata Per Wajib Pajak Per Tindakan Penagihan .....	77
Tabel 7	Tindakan Penagihan dengan Surat Paksa yang diterbitkan dan yang Terbayar .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.    Prosedur Pemblokiran dan Penyitaan Saldo Rekening Wajib Pajak/ Penanggung Pajak di Bank .....	58
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Surat Teguran .....	100
Lampiran 2	Surat Paksa .....	101
Lampiran 3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan .....	102
Lampiran 4	Surat Ketetapan Pajan Kurang Bayar.....	103
Lampiran 5	Surat Keputusan keberatan Pajak.....	104